

PENGARUH INVESTASI, TINGKAT HUNIAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD DAN IPM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

**Muhammad Syaifuddin Jihansyah¹
Ni Nyoman Yuliarmi²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail:syaifuddinjihansyah@gmail.com

ABSTRAK

Menjadi salah satu daerah tujuan wisata populer bagi wisatawan mendorong Provinsi Bali selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh investasi, tingkat hunian hotel dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan serta mengetahui pendapatan asli daerah dalam memediasi pengaruh investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan data sekunder dengan 72 jumlah pengamatan menggunakan teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, tingkat hunian hotel dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia, sedangkan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pendapatan asli daerah merupakan variabel yang memediasi pengaruh tingkat hunian hotel dan retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pendapatan asli daerah bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci :investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dan indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

Being popular tourist destinations encourages Bali to always strive for welfare of its people that can be seen from Human Development Index. Purpose of this study is to analyze the effect of investment, hotel occupancy rates and local user fees on regional original income and development indices and find out local revenue mediate in effect of investment, hotel occupancy rates, regional user fees on human development index in Bali. Secondary data with 72 observations using path analysis was used. Results showed, investment had no significant effect on regional original income, hotel occupancy rates and regional fees had significant effect on regional original income and human development index, regional retribution had no significant effect on the human development index. Local own income mediates the effect of hotel occupancy rates and local user fees on the human development index, while regional own income doesnot mediates effect of investment on human development index.

Keywords:*investment, hotel occupancy rate, regional retribution, local original income, and human development index*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin. Tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (Pisano *et al.*, 2015). Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut (Ishartono & Raharjo, 2016). Pembangunan daerah yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia disebut sebagai indikator kesejahteraan masyarakat melalui nilai angka harapan hidup pada saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran. Terdapat empat elemen penting dalam pembangunan manusia, yaitu produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Melalui peningkatan kemampuan kreatifitas dan produktifitas tersebut maka akan mendukung masyarakat menjadi agen pertumbuhan yang

efektif. Pembangunan manusia sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang normal. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah khususnya Provinsi Bali (Bela & Setiawina, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yaitu dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi (Jayanthi dan Arka,2015).

Kesejahteraan itu sendiri merupakan suatu cita-cita di dalam masyarakat yang harus diperjuangkan oleh masyarakat dan pemerintah melalui keluarga yang menjadi kesatuan inti yang memiliki peran penting dalam menentukan pembangunan nasional (Ardika & Budhiasa, 2017). Salah satu tujuan utama yang ingin diraih oleh setiap daerah termasuk bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat diamati dari angka-angka IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dan kondisi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung meningkat tetapi terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota lainnya. Dengan skala pengukuran IPM ini dapat dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Rata - rata Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2015-2017 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini digunakan untuk membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperhatikan dampak pembangunan yang dilakukan periode sebelumnya. Pada

tahun 2015 hingga tahun 2017 tingkat IPM di Kabupaten Denpasar adalah yang paling tinggi, akan tetapi pada Kabupaten Karangasem menjadi yang paling rendah dan terjadi ketimpangan pendapatan diantara kabupaten/kota lainnya karena pembangunan pada Kabupaten Karangasem masih belum merata, dimana angka ini termasuk angka yang rendah untuk Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015 –2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Jembrana	69,66	70,38	70,72
Tabanan	73,54	74,19	74,86
Badung	78,86	79,8	80,54
Gianyar	75,03	75,7	76,09
Klungkung	68,98	69,31	70,13
Bangli	66,24	67,03	68,24
Karangasem	64,68	65,23	65,57
Buleleng	70,03	70,65	71,11
Denpasar	82,24	82,58	83,01
Provinsi Bali	73,27	73,65	74,3

Sumber: Data Diolah, 2019

Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Meningkatnya ketimpangan dapat menghasilkan protes keras dan tindakan kolektif lainnya seperti perilaku yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (De Silva & Sumarto, 2015). Dengan dominasi serta potensi sumberdaya pariwisata yang ada utamanya kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka tidak menutup kemungkinan IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali akan meningkat. Pariwisata merupakan suatu perjalanan seseorang atau lebih yang dilakukan untuk sementara waktu dari suatu daerah ke daerah lain, dengan tujuan untuk berekreasi atau pun berlibur dan tidak bermaksud untuk mencari pekerjaan di tempat yang dikunjungi (Kamal & Pramanik, 2015). Tingkat hunian wisatawan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sektor

pariwisata. Semakin tingginya tingkat hunian wisatawan di suatu daerah menunjukkan bahwa pariwisata di daerah tersebut sudah berkembang pesat sehingga memberikan dampak yang baik dalam kesejahteraan masyarakat utamanya melalui penyerapan tenaga kerja. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menyebabkan adanya daya tarik tersendiri pada para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Masuknya modal dari luar negeri dalam bentuk investasi swasta penting untuk pertumbuhan ekonomi. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu, sehingga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (Wiagustini, 2017).

Sektor pariwisata sangat dilirik oleh para investor karena hal ini menjadikan kesempatan besar untuk para investor dalam menanamkan modalnya melalui pembangunan hotel – hotel baik hotel berbintang ataupun tidak berbintang dan pembangunan obyek wisata demi menunjang kenyamanan para wisatawan saat berkunjung sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dapat semakin membaik utamanya di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional yang dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi dalam jangka waktu panjang dan direncanakan untuk meningkatkan kualitas semua kehidupan masyarakat, diharuskan ada dua di dalam pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu

proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan perubahan struktur dilihat dari ekonomi, sosial, dan struktur politik. Parameter pembangunan ekonomi pada tingkat provinsi dapat diukur dengan tinggi rendahnya PDRB suatu provinsi. Namun pada tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Semakin besar pendapatan asli daerah maka daerah tersebut semakin mandiri yang ditunjukkan oleh ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin berkurang.. PAD yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Jaya dan Widanta, 2014). PAD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 2 seperti berikut.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2017 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/kota	2015	2016	2017
Jembrana	98,033	114,53	121,34
Tabanan	300,8	318,08	426,64
Badung	3001,5	3563,4	4172,5
Gianyar	45,721	529,86	662,75
Klungkung	120,04	134,14	153,21
Bangli	87,731	104,82	104,59
Karangasem	243,13	318,08	198,58
Buleleng	293,04	282,11	455,2
Denpasar	776,21	807,05	1008,7
Provinsi Bali	3041,3	3041,2	3398,5

Sumber: Data Diolah, 2019

Tahun 2015 hingga tahun 2017 pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di

Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem tahun 2015-2017 serta terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki PAD tertinggi, karena Kabupaten Badung menjadi pusat pariwisata dan kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi Bali sedangkan Kabupaten Bangli menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya, karena kegiatan ekonomi Kabupaten Bangli belum mampu menambah penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi Bali khususnya di kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemerataan pendapatan agar nantinya tidak terjadi ketimpangan antar daerah.

Menurut Zaei & Zaei (2015), pariwisata tidak terbatas hanya untuk kegiatan di akomodasi dan sektor perhotelan, sektor transportasi dan sektor hiburan seperti, taman hiburan, fasilitas olahraga, museum. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat menjadi sumber baru pendapatan utama di daerah khususnya kabupaten/kota, sehingga akan menciptakan penurunan yang signifikan dalam kemiskinan di daerah tersebut (Klytchnikova & Dorosh, 2015). Dengan adanya kegiatan pariwisata akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah karena sangat penting untuk ditingkatkan, jika retribusi di Provinsi Bali terus bertambah, maka akan membantu meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan bertambah.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah. 1) Untuk menganalisis pengaruh Investasi, Tingkat Hunian Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung Investasi, Tingkat Hunian Hotel, Retribusi Daerah dan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Untuk mengetahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh Investasi, Tingkat Hunian Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Konsep penelitian ini menganalisis pengaruh investasi, tingkat hunian hotel dan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Selain itu, investasi juga mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya akan meningkatkan *output* potensial suatu bangsa dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya investasi asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas di mana akan menambah penerimaan pendapatan nasional suatu Negara dan menambah penerimaan pendapatan suatu daerah tersebut (Taufik, 2015).

Hotel merupakan sebuah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan dan pelayanan-pelayanan umum lainnya. Banyaknya

wisatawan yang diikuti dengan lamanya waktu tinggal di suatu daerah tujuan wisata tentunya akan membawa dampak positif terhadap tingkat hunian hotel (Orsini & Ostojic, 2018). Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, semakin menuntut keseriusan pengelola hotel dalam memperbaiki layanannya kepada para tamu agar tamu-tamu hotel tersebut merasa betah dan memutuskan lebih lama lagi untuk menginap di hotel yang mereka tempati. Peningkatan tingkat hunian hotel pada akhirnya akan meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak hotel. Pernyataan tersebut di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Farronato & Fradkin (2018), yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Bendesa (2016) menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Suatu tanggapan menekankan dan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian program pendapatan daerah. Retribusi ini sangat penting untuk ditingkatkan, jika retribusi di Provinsi Bali terus bertambah, maka akan membantu meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan bertambah. Dari pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Susilowati &

Rahmadewi (2017) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penilitan yang dilakukan oleh Simanjuntak *et al.* (2017) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi (Yusuf & Sumner, 2015). Dukungan para investor juga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan diatas di dukung dengan penelitian yang dilakukan Awandari & Indrajaya (2016), menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat hunian wisatawan yang tinggi maka diperlukan tenaga kerja yang dapat memenuhi kepuasan wisatawan, dimana masyarakat lokal sekitar daerah tujuan wisata dapat berkontribusi.

Indeks pembangunan manusia di daerah tujuan wisata dapat berkembang dalam menampilkan kemampuannya dalam bidang pariwisata khususnya dalam tingkat hunian hotel. Dengan demikian peningkatan tingkat hunian hotel akan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pernyataan tersebut di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mao *et al.* (2018), menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan

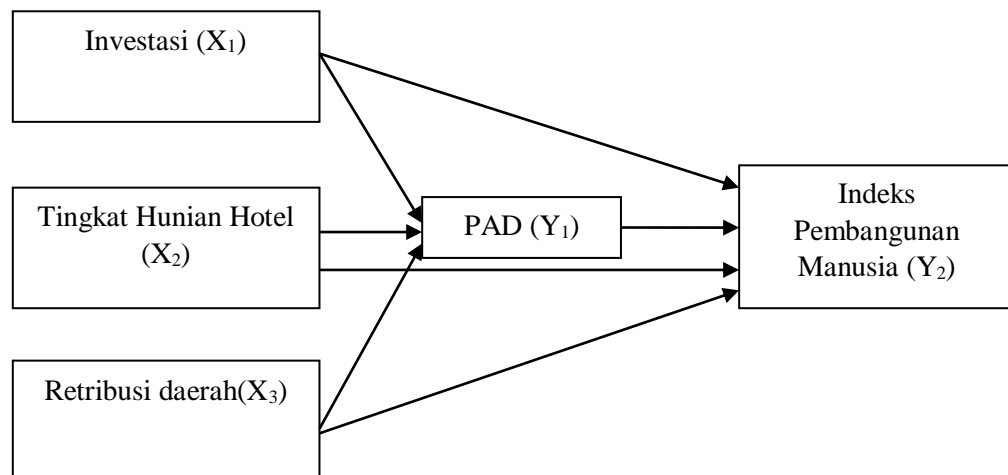
Farronato & Fradkin (2018), yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, nantinya bisa membiayai daerah guna melaksanakan otonominya, juga mampu mandiri baik daerahnya sendiri. Dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah jelas akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Perencanaan pembangunan dipandang sebagai pedoman atau panutan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih atau dengan kata lain dapat dijadikan sebuah jembatan dalam perekonomian apabila pemerintah mengharapkan keberhasilan yang lebih baik. Suatu perencanaan yang matang dalam sebuah upaya pembangunan menjadi unsur yang penting demi meningkatkannya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemberian otonomi secara luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat (Fajri, 2016).

Kinerja pemerintah yang baik sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Zouhaier, 2015). Salah satu indikator dalam melihat gejala pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan atau yang dapat dicapai dalam satu periode. Menurut Caraka (2019), pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Tanpa adanya dana yang cukup, maka

ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Pendapatan asli daerah juga dapat digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan kajian pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1) Investasi, tingkat hunian hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Pendapatan asli daerah memediasi pengaruh investasi, tingkat hunian dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Bali.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Investasi, Tingkat Hunian Hotel dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kasual dari tahun 2010-2017. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika. Alasan pengambilan lokasi penelitian kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah karena masih ada ketimpangan di dalam indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi sektor pariwisata baik wisata alam maupun wisata lainnya, permintaan akan tempat huniannya semakin meningkat dan retribusi daerah meningkat, namun dalam hal ini investasi yang terjadi pada provinsi ini mengalami fluktuasi padahal masih banyak lahan yang dapat dikembangkan untuk membangun tempat hunian utamanya di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusianya dalam setiap wilayah yang ada di Provinsi Bali.

Investasi (X_1) dalam penelitian ini adalah Investasi yang masuk di kabupaten/kota Provinsi Bali baik investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing dalam satuan miliar rupiah per tahun 2010-2017. Tingkat hunian hotel (X_2) dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah kamar yang dihuni dibagi kamar yang disediakan dikalikan seratus persen. Tingkat hunian hotel akan menggambarkan sejauh mana jumlah kamar hotel di kabupaten/kota Provinsi Bali mampu terjual. Variabel ini dihitung dengan satuan persen per tahun 2010-2017. Retribusi daerah (X_3) dalam

penelitian ini adalah merupakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu di kabupaten/kota di Provinsi Bali . Variabel ini dihitung dengan satuan miliar rupiah per tahun 2010-2017. Pendapatan asli daerah (Y_1) dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan satuan miliar rupiah per tahun 2010-2017. Indeks Pembangunan Manusia (Y_2) dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Variabel ini diukur dalam satuan poin per tahun 2010-2017.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi non partisipan. Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data kualitatif yang digunakan yaitu berupa keterangan mengenai lokasi penelitian dan uraian mengenai investasi, tingkat hunian, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi, tingkat hunian, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Bali dan literature-literature lain yang mendukung tentang objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata yang kaya akan keindahan alam dan budaya, menuntut pemerintah untuk mampu mengelola dan memberikan sarana dan prasarana penunjang sector pariwisata sebagai sektor unggulan. Di dalam pembangunan suatu wilayah, daerah perlu menggelontorkan biaya yang relatif besar, sehingga ada kecenderungan pemerintah untuk mengadakan kerjasama dengan investor. Sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang disebut investasi (Todaro, 2006). Kerjasama yang diharapkan dapat berupa investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dari investor di Provinsi Bali. Investasi yang mampu dikelola dengan baik, akan mampu memeberikan *multiplier effect* pada semua sektor yang ada di Bali, sehingga nantinya diharapkan mampu mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Tabel 3. Realisasi Investasi Total Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2017 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Investasi (miliar rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	0,07	1,17	0,11	0,08	0,22	0,2	7,07	0,28
Tabanan	0,91	3,17	0,79	0,44	0,74	0,82	5,3	0,19
Badung	2,63	1,16	7,18	6,15	2,62	3,93	0,62	5,91
Gianyar	0,05	0,18	0,33	1,23	0,54	1,18	0,81	0,19
Klungkung	0,26	0,03	0,06	0,03	0,07	0,12	0,56	2,98
Bangli	0,03	0,64	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Karangasem	1,3	2,17	0,12	0,19	0,14	0,15	1,09	0,39
Buleleng	0,28	2,94	0,46	0,26	3,36	3,44	0,42	1,13
Denpasar	0,08	11,7	3	3,03	1,2	14,2	0,17	6,37
Provinsi Bali	6,86	11,7	12,1	11,4	8,92	24,1	16	17,5

Sumber: Data Diolah, 2019

Realisasi investasi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali memperlihatkan bahwa adanya ketimpangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali. Investor menanamkan modalnya dalam bentuk investasi tertinggi pada tahun 2017 di Kota Denpasar dengan jumlah Rp 6,37 miliar, sedangkan yang terendah di Kabupaten Bangli dengan jumlah investasi yang masuk sebesar Rp 0,02 miliar rupiah, karena investasi di Kabupaten Bangli hanya sebagian kecil modal yang digunakan dalam jangka panjang. Ketimpangan yang terjadi menyebabkan pembangunan di masing-masing daerah sedikit terhambat dan mengalami perbedaan pola dalam pengelolaan aliran dana yang masuk. Perbedaan tersebut mengakibatkan kecenderungan lapangan pekerjaan baru tercipta menjadi berbeda di setiap daerah dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Keindahan alam dan keberagaman budaya yang terdapat di Provinsi Bali, menyebabkan sektor pariwisata di Bali menjadi salah fokus utama pembangunan, hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa sektor pariwisata akan mampu memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya di Provinsi Bali. Letak wilayah dapat mempengaruhi perkembangan dari suatu daerah, hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi dan cara pengelolaan sumber daya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari setiap daerah.

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Jembrana	841,8	5	10	41
Tabanan	839,33	10	0	133
Badung	418,52	6	16	46
Gianyar	368	7	6	64
Klungkung	315	4	6	53
Bangli	520,81	4	4	68
Karangasem	839,54	8	3	75
Buleleng	1.365,88	9	19	129
Denpasar	127,78	4	16	27
Provinsi Bali	4270,78	57	80	636

Sumber: Data Diolah, 2019

Luas wilayah yang berbeda-beda di masing-masing daerah tidak selamanya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi kabupaten/kota di Provinsi Bali masih terdapat ketimpangan diantaranya karena tidak meratanya jumlah investasi di masing-masing daerah, tingkat hunian hotel dan retribusi daerah yang diterima masing-masing daerah di Provinsi Bali, serta kemampuan daerah dalam mengalokasikan PAD guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	Tingkat Hunian Kamar Hotel (Persen)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	14,45	14,42	15,07	16,16	12,5	10,45	14,69	14,91
Tabanan	17,36	19,74	20,27	21,56	23,06	20,46	20,2	29,82
Badung	65,47	62,89	57,1	57,36	52,34	53,03	55,90	59,28
Gianyar	38,9	39,5	39,44	46,13	45,08	44,67	47,09	45,21
Klungkung	34,3	45,73	31,97	49,01	35,54	43,24	43,39	51,54
Bangli	12,08	12,57	12,69	14,26	9,11	7,05	8,63	4,87
Karangasem	17,25	18,11	21,03	35,01	34,93	31,76	32,38	35,07
Buleleng	24,91	25,95	27,28	24,43	26,69	26,91	26,15	27,61
Denpasar	45,29	44,31	44,31	45,23	43,17	46,21	44,11	47,39
Provinsi Bali	40,39	31,46	29,9	34,35	31,38	31,53	32,5	35,08

Sumber: Data Diolah, 2019

Delapan tahun terakhir tingkat hunian hotel kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Kabupaten Bangli merupakan yang terendah dengan 4,87 persen pada tahun 2017 karena pembangunan di bidang pariwisata pada Kabupaten Bangli masih belum maksimal, sedangkan yang tertinggi pada Kabupaten Badung dengan 65,47 persen pada tahun 2010 karena pusat industri pariwisata yang ada di Provinsi Bali adalah di Kabupaten Badung. Dengan meningkatnya tingkat hunian hotel dapat menambah pajak daerah dan menambah penerimaan pendapatan

Tabel 6. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2017 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah (miliar rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	8,13	4,522	6,751	7,905	8,837	8,925	10,24	9,191
Tabanan	18,63	20,52	28,54	40,39	42,56	47,03	22,4	20,47
Badung	42,47	35,83	68,95	90,46	116,5	96,04	118,5	128,7
Gianyar	21,28	27,53	30,4	31,82	35,47	40,06	40,76	39,28
Klungkung	20,12	26,78	16,99	10,6	22,44	21,78	21,87	22,98
Bangli	7,739	12,65	10,1	11,3	15	18,57	25,55	23,46
Karangasem	8,203	7,925	10,98	11,99	13,02	14,26	15,98	12,58
Buleleng	10,37	11,19	13,13	14,87	12,68	19,94	15,13	17,08
Denpasar	26,19	24,42	43,77	47,87	54,76	59,23	49,61	40,05
Provinsi Bali	163,1	171,4	212,6	267,2	321,3	325,8	320,1	313,8

Sumber: Data Diolah, 2019

Kabupaten Badung menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota yang lain dengan 128,7 miliar rupiah, karena Kabupaten Badung sebagai pusat perekonomian dan industri khususnya pariwisata yang ada di Provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Jembrana menjadi yang terendah karena penerima retribusi di Kabupaten Jembrana masih belum optimal.

Tabel 7. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2017 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	34,381	41,331	46,47	68,485	89,35	98,033	114,53	121,34
Tabanan	107,84	141,05	183,3	255,42	273,43	300,8	318,08	426,64
Badung	979,24	1406,3	1870,2	2279,1	2722,6	3001,5	3563,4	4172,5
Gianyar	153,62	175,27	261,22	319,61	424,47	45,721	529,86	662,75
Klungkung	31,331	40,736	48,562	67,402	98,838	120,04	134,14	153,21
Bangli	16,253	22,961	40,751	55,987	76,141	87,731	104,82	104,59
Karangasem	62,696	129,56	144,02	168,65	239,43	243,13	318,08	198,58
Buleleng	86,962	109,17	129	160,29	219,68	293,04	282,11	455,2
Denpasar	257,9	424,96	511,33	658,97	698,74	776,21	807,05	1008,7
Provinsi Bali	1393,7	1723,8	2042,1	2530	2920,4	3041,3	3041,2	3398,5

Sumber: Data Diolah, 2019

Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 mengalami penurunan, karena kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng belum mampu menambah penerimaan pendapatan asli daerah. PAD tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh Kabupaten Badung sebesar Rp 4172,5 miliar, lebih besar dari PAD yang diperoleh Provinsi Bali sebesar Rp 3398 miliar. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh Kabupaten Badung merupakan pusatnya pariwisata Provinsi Bali, sehingga segala kegiatan perekonomian dapat tumbuh dan berkembang pesat di Kabupaten Badung. Namun, kegiatan perekonomian yang berkembang pesat di Kabupaten Badung tidak dapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya, sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok.

Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia yaitu kelompok “sangat tinggi” yaitu wilayah yang mencapai $IPM \geq 80$, kelompok “tinggi” yaitu sebesar $70 \leq IPM < 80$, kelompok “sedang” yaitu sebesar $60 \leq IPM < 70$ dan kelompok “rendah” yaitu wilayah yang mencapai $IPM < 60$ (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	66,7	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72
Tabanan	70,68	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86
Badung	75,84	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86	79,8	80,54
Gianyar	71,45	72,5	73,36	74	74,29	75,03	75,7	76,09
Klungkung	66,01	67,01	67,64	68,08	68,3	68,98	69,31	70,13
Bangli	63,43	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24
Karangasem	60,58	61,6	62,95	63,7	64,01	64,68	65,23	65,57
Buleleng	66,98	67,73	68,29	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11
Denpasar	79,19	79,77	80,45	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01
Provinsi Bali	70,1	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,3

Sumber: Data Diolah, 2019

Kota Denpasar menjadi yang tertinggi dengan tingkat indeks pembangunan manusianya sebesar 83,01 pada tahun 2017 dan Kabupaten Karangasem menjadi yang paling terendah dengan tingkat indeks pembangunan manusianya sebesar 65,27 pada tahun 2017. Belum meratanya pembangunan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar daerah di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,066 dan nilai probabilitas sebesar $0,476 > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya investasi maka pendapatan asli daerah semakin turun. Kurang meratanya investasi di setiap daerah menyebabkan ketimpangan jumlah investasi di setiap daerah tersebut yang

nantinya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali belum mampu dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara tepat dalam pengembangan usaha yang belum mampu memberikan dampak pada bertambahnya pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kurniawan & Managi (2018), adanya kemungkinan investasi yang masuk digunakan lebih banyak untuk konsumsi daerah dan hanya sebagian kecil dipergunakan untuk modal yang dapat dipergunakan dalam jangka panjang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syam *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,301 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya tingkat hunian hotel maka pendapatan asli daerah semakin meningkat. Peningkatan tingkat hunian hotel pada akhirnya akan meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak hotel. Banyaknya wisatawan yang diikuti dengan lamanya waktu tinggal di suatu daerah tujuan wisata tentunya akan membawa dampak positif terhadap tingkat hunian hotel (Orsini & Ostojic, 2018). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Bendesa (2016) yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,821 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya retribusi daerah

berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya retribusi daerah maka pendapatan asli daerah semakin meningkat. Retribusi daerah sangat penting untuk ditingkatkan, jika retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terus bertambah, maka akan membantu meningkatkan pembangunan daerah, sehingga suatu daerah mampu menambah kekayaan daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati & Rahmadewi (2017) serta Simanjuntak *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,163 dan nilai probabilitas sebesar $0,045 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya investasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya investasi maka indeks pembangunan manusia semakin meningkat. Kegiatan investasi sangat penting untuk dilakukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali karena adanya investasi dapat membentuk lapangan pekerjaan baru dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awandari & Indrajaya

(2016) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,036 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya tingkat hunian hotel maka indeks pembangunan manusia semakin meningkat. Tingkat hunian hotel merupakan salah satu faktor pendukung dalam sektor pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indeks pembangunan manusia di daerah tujuan wisata dapat berkembang dalam menampilkan kemampuannya dalam bidang pariwisata khususnya dalam tingkat hunian hotel. Dengan demikian peningkatan tingkat hunian hotel akan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mao *et al.* (2018) dan Farronato & Fradkin (2018) yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,361 dan nilai probabilitas sebesar $0,077 > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya retribusi daerah maka indeks pembangunan manusia semakin turun. Retribusi daerah belum mampu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kurang meratanya pendapatan di setiap daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar kabupaten/kota. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhly (2018) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,001 dan nilai probabilitas sebesar $0,034 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka indeks pembangunan manusia semakin meningkat.

Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali semakin membaik. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan daerahnya yang tinggi. Kinerja pemerintah yang baik sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Zouhaier, 2015). Salah satu indikator dalam melihat gejala pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan atau yang dapat dicapai dalam satu periode.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 98 persen artinya sebesar 98 persen variabel investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh

model, sedangkan sisanya sebesar 2 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Oleh karena z hitung sebesar 8,08 lebih besar dari 1,96 berarti pendapatan asli daerah merupakan variabel yang memediasi pengaruh variabel tingkat hunian hotel terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. z hitung sebesar 6,729 lebih besar dari 1,96 berarti pendapatan asli daerah merupakan variabel yang memediasi pengaruh variabel retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 9. Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, Total Variabel Investasi, Tingkat Hunian Hotel, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan Variabel	Pengaruh		
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	Total
X ₁ → Y ₁	-0,066	-	-0,066
X ₁ → Y ₂	0,288	-3,301	-3,013
X ₂ → Y ₁	0,301	-	0,301
X ₂ → Y ₂	0,503	8,087	8,590
X ₃ → Y ₁	0,821	-	0,821
X ₃ → Y ₂	-0,361	6,729	6,368
Y ₁ → Y ₂	0,376	-	0,376

Pembangunan memiliki tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah suatu usaha dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia memiliki makna lebih dalam yaitu, sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Indeks pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Keterkaitan antara investasi, tingkat hunian hotel, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan indeks pembangunan manusia sangat erat.

Ketimpangan dalam indeks pembangunan manusia yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali disebabkan oleh masih timpangnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing daerah, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam menarik investor, kesenjangan pembangunan infrastruktur pada masing-masing daerah menjadi salah satu faktor pendorong lemahnya investasi di beberapa kabupaten di Provinsi Bali, sehingga investor hanya akan memusatkan penanaman modal di satu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya ketimpangan investasi yang berujung pada ketimpangan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Bali.

Selain upaya dari pihak luar dan pemerintah pusat dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan yang terjadi, pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan dengan maksimal pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan utama dari suatu daerah. Pemerintah daerah harus memanfaatkan kemajuan industri salah satunya industri jasa disektor pariwisata melalui pajak hotel yang dilihat dari tingkat hunian hotel di setiap daerahnya dan pendapatan retribusi daerah guna menambah penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Provinsi Bali memang cenderung besar, tetapi perbedaan kemampuan daerah menyebabkan ketimpangan dalam perolehan pendapatan asli daerah di masing-masing kabupaten/kota. Kemampuan yang berbeda tersebut memberikan dampak pada perbedaan kemampuan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang baik dan kesehatan yang merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat hunian hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi, tingkat hunian hotel dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah memediasi pengaruh retribusi daerah dan tingkat hunian hotel terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia.

Disarankan untuk meningkatkan dan menggunakan investasi untuk modal yang dapat dipergunakan dalam jangka panjang. Peran pemerintah untuk dapat mengupayakan penyebaran investasi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Bali, sehingga pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia lebih merata dan mengurangi ketimpangan di setiap daerahnya.

Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sekolah atau rumah sakit, serta pemerintah daerah perlu lebih memberikan perhatian kepada masyarakat mengenai indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, seperti: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita masyarakatnya. Pemerintah daerah lebih selektif dalam

mengelola pajak dan retribusi agar pengalokasian pendapatan asli daerah tersebut dapat terdistribusi dengan optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

REFERENSI

- Ardika, I. W., & Budhiosa, I. G. S. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Piramida*, 13(2), 87–96.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1347–1585.
- Bela, G. B. K., & Setiawina, D. (2019). Pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(7), 1666–1696.
- Caraka, R. E. (2019). Pemodelan Regresi Panel Pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 55–61.
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2015). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 50(2), 227–242.
- Dewi, A. . I. A. D. S., & Bendesa, I. K. . (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(2), 260–275.
- Fadhly, Z. (2018). Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–15.
- Fajri, M. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kreatif Terapan*, 9(2), 99–107.
- Farronato, C., & Fradkin, A. (2018). The Welfare Effects of Peer Entry in the Accommodation Market: The Case of Airbnb. *Nationa Bureau of Economic Research*, 1–50.
- Hukom, A. (2015). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Suistanable Development Goals (SDGs). *Social Work Journal*, 6(6), 1–20.
- Kamal, M., & Pramanik, S. A. K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for

- Museums. *IOSR Journal Of Business and Management*, 17(10), 85–92.
- Klytchnikova, I., & Dorosh, P. (2015). Tourism Sector in Panama, Regional Economics Impact and The potential to Benefit The Poor. *IFRI*, 2(4), 1–23.
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies Volume 54, - Issue 3*, 54(3), 1–20.
- Mao, Y., Tian, X., & Ye, K. (2018). The Real Effects of Sharing Economy: Evidence from Airbnb. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3111975>
- Orsini, K., & Ostojić, V. (2018). Croatia's Tourism Industry: Beyond the Sun and Sea. *European Economy Economic Briefs*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.2765/380567>
- Pisano, U. L. K., Lange, M. H., & Berger, G. (2015). The Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impact on the European SD Governance Framework. *ESDN*, 35(1), 1–55.
- Simanjuntak, J., Ratnawati, T., & Rahmiyati, N. (2017). Economic Growth as Mediation of Regional Own Source Revenue, Investment and Asset Management on Labor Absorption and Social Welfare in Regencies/Cities in Riau Islands Province. *International Journal of Economics and Finance*, 9(8), 127. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n8p127>
- Susilowati, E., & Rahmadewi, D. E. (2017). Encouraging a Regional Autonomy in Indonesia: An Analysis of Factors Affecting the Own Source Revenue of Central Java Province. *RCHE*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i6.2396>
- Syam, A. Y., Lisandri, Rizani, F., & Oikawa, S. (2018). Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province. *Journal Research and Analysis: Economy*, 1(May), 1–9.
- Taufik, M. (2015). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 90–101.
- Wiagustini, N. L. P. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 155–173.
- Wijayanti, N. K. H., & Darsana, I. B. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(9), 1164–1193.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 51(3), 323–348.
- Zaei, M. E., & Zaei, M. E. (2015). The Impacts Of Tourism Industry On Host Community. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, 1(2), 12–21.
- Zouhaier, H. (2015). Institution, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152–162.